

Esensi setiap kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksikan diri ke dalam situasi lain dan arena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Dari tujuan di atas, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berbasis masyarakat itu sendiri menuju pada kondisi perbaikan mutu hidup yang diharapkan. Oleh sebab itu Ife (2008) menyatakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan. Definisi ini berangkat dari konsep utama yaitu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.



Pohon Tua Pustaka  
0878337321207  
@pohon.tua.pustaka



KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN DI ERA 4.0

# KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN DI ERA 4.0

EDITOR: DR. YULI SETYOWATI, S.IP, M.Si.



PROGRAM STUDI  
ILMU KOMUNIKASI  
STPMD "APMD" YOGYAKARTA  
ikom.apmd.ac.id

# KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN DI ERA 4.0

Oleh:

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
STPMD “APMD”

Hak Menerbitkan©2020 oleh Pohon Tua Pustaka

Hak Cipta©2020 oleh Penulis

Ukuran: 14 x 21 cm

ISBN: 978-623-6643-05-1

Penulis:

1. Fadjarini Sulistyowati, S.IP, M.Si
2. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si
3. Dr. Yuli Setyowati, S.IP, M.Si
4. Dr. Irsasri, M.Pd
5. Ade Chandra, S.Sos, M.Si
6. Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM
7. Tri Agus Susanto, S.Pd. M.Si

Desain layout: Pohon Tua Pustaka

Dasain cover: Pohon Tua Pustaka

Editor: Dr. Yuli Setyowati, S.IP, M.Si

Segala bentuk tindakan memperbanyak ataupun plagiasi terhadap buku ini tanpa seizin Pohon Tua Pustaka, akan ditindak tegas sesuai yang tertera pada: Pasal 113 **Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

## PENGANTAR EDITOR

Kemunculan paradigma baru komunikasi pembangunan ditandai dengan adanya kesadaran bahwa proses komunikasi dalam pembangunan harus berpedoman pada kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan. Dalam hal ini masyarakat bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan, oleh sebab itu partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting. Komunikasi dilaksanakan secara konvergen, interaksi komunikasi dilakukan secara lebih demokratis dan partisipatif. Kegiatan komunikasi bukan kegiatan memberi dan menerima melainkan “berbagi” dan “berdialog.” Selama ini, keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat hanya dipandang sebagai pihak penerima inovasi pembangunan semata, tanpa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan tidak dikembangkan daya kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar dirinya. Akibatnya tercipta ketergantungan masyarakat pada pihak lain, tidak berdaya dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma alternatif pembangunan dengan tujuan membawa masyarakat kepada keberdayaan dan kemandirian. Untuk menuju pada kemandirian masyarakat, upaya pencapaian kesejahteraan menjadi hal yang utama. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengatasi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materiil maupun non-materiiln seperti dinyatakan oleh Mardikanto (2010) bahwa tujuan pembangunan adalah perubahan yang menyeluruh mencakup beragam aspek dan tatanan kehidupan masyarakat yang bersangkutan, baik materiil maupun non-

materiil. Esensi setiap kegiatan pembangunan adalah terjadinya perubahan sikap untuk memproyeksikan diri ke dalam situasi lain dan arena itu secara sadar dan terencana menyiapkan diri untuk melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki mutu hidupnya guna mengantisipasi keadaan dan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa mendatang. Dari tujuan di atas, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berbasis masyarakat itu sendiri menuju pada kondisi perbaikan mutu hidup yang diharapkan. Oleh sebab itu Ife (2008) menyatakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan. Definisi ini berangkat dari konsep utama yaitu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Menurut Chambers (1995), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered development, participatory, empowering, and sustainable*”. Konsep ini berkembang dari beberapa pemikiran tentang *alternative development*, salah satunya adalah pemikiran Friedman, yang menghendaki adanya “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equity and intergenerational equity*”.

Berangkat dari tujuan pengembangan masyarakat untuk membangkitkan sumber daya manusia, maka inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan untuk memberdayakan mereka. Untuk itu dibutuhkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban,

kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus (FCDL dalam Zubaedi, 2014).

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang memerlukan proses berkelanjutan, maka dibutuhkan komunikasi yang baik antara inisiator program dengan masyarakat maupun antar warga masyarakat. Proses pemberdayaan tersebut tidak akan mencapai tujuannya, jika tidak didukung oleh proses komunikasi yang partisipatif. Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan cita-cita perubahan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tindakan komunikatif yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Resistansi masyarakat dalam proses pemberdayaan masih sering muncul karena perasaan saling curiga diantara komponen masyarakat tentang kepentingan-kepentingan di balik upaya pemberdayaan, terutama dari kelompok masyarakat yang tidak menjadi sasaran utama program pemberdayaan tersebut. Walaupun resistansi terhadap upaya-upaya pemberdayaan untuk membawa pada perubahan masyarakat cukup tinggi, komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam terbentuknya tindakan komunikatif masyarakat.

Hadirnya komunikasi pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan, terutama dalam rangka mempercepat proses difusi inovasi. Difusi inovasi dalam pembangunan ini merupakan upaya memenuhi tuntutan modernisasi. Oleh sebab itu, pembangunan seringkali disamakan dengan istilah modernisasi. Salah satu indikator modernisasi adalah hadirnya teknologi komunikasi yang sangat cepat perkembangannya. Teknologi komunikasi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia pada akhirnya

tidak mampu menempatkan manusia sebagai subjek, namun justru menjadi objek teknologi. Ketidakberdayaan individu manusia ketika berhadapan dengan teknologi komunikasi merupakan gambaran dari gagalnya proses pembangunan dan perubahan sosial yang berpusat pada manusia. Masyarakat seringkali tidak berdaya membendung hegemoni teknologi komunikasi. Oleh sebab itu komunikasi pemberdayaan menjadi perspektif baru dalam pendidikan komunikasi pembangunan dengan semangat *voicing the voiceless*. Penelitian ini bertujuan mengungkap perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat “kampung preman” dalam proses pembangunan sebagai gambaran keberdayaan masyarakat dalam berkomunikasi dilihat dari perspektif teori tindakan komunikatif.

Peran komunikasi dalam masyarakat dikemukakan secara lebih khusus oleh Dewey (Mulyana, 2002), bahwa masyarakat eksis melalui komunikasi, perspektif yang sama, budaya yang sama, muncul melalui partisipasi dalam saluran komunikasi yang sama. Melalui partisipasi sosial perspektif bersama dalam kelompok diinternalisasikan dan berbagai pandangan muncul melalui kontak dan asosiasi yang berbeda. Melalui interaksi atau komunikasi orang-orang dapat bertukar makna, nilai dan pengalaman dengan menggunakan simbol dan tanda. Dalam kaitannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Dalam hal ini, komunikasi tak akan lepas dari konteks sosialnya, artinya proses komunikasi akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, dan pranata masyarakatnya.

Perubahan perilaku dan tindakan komunikatif masyarakat semakin lama semakin mengarah pada kemandirian dan kreativitas masyarakat. Tindakan komunikatif masyarakat mencerminkan adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi, baik antarindividu, individu dengan kelompok, dan antarkelompok. Dengan adanya peningkatan kemampuan berkomunikasi, masyarakat menjadi terbiasa berjejaring sehingga semakin mandiri dan kreatif. Inilah yang disebut sebagai komunikasi pemberdayaan, suatu proses komunikasi yang memanusiakan manusia, partisipatif dan menyuarakan pihak-pihak yang selama ini tak mampu bersuara (*voicing the voiceless*).

Komunikasi pemberdayaan merupakan perspektif baru dalam pendidikan komunikasi pembangunan dapat terlihat dari perubahan pola pikir masyarakat berdampak pada perubahan pola perilaku. Dalam proses perubahan ini akan terlihat bahwa pada masyarakat terjadi proses *self-help* (menolong diri sendiri) untuk keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Tindakan komunikatif masyarakat dalam proses pemberdayaan memperlihatkan keberdayaan masyarakat dalam berkomunikasi yang menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Berfungsinya kelompok-kelompok sosial di suatu masyarakat menjadi ruang-ruang publik bagi warganya untuk berkomunikasi dan berekspresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat. Kelompok sosial sebagai wadah paling efektif untuk pemberdayaan di tingkat komunitas yang memungkinkan individu untuk mengorganisir diri dalam



kelompok tersebut (*collective self-empowerment*) sehingga terjadi suatu *dialogical encounter* (pertemuan dialogis) yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran berkomunikasi dan solidaritas kelompok. Masyarakat menjadi pihak yang aktif dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dalam proses belajar dan diinternalisasikan dalam tindakan komunikatif mereka. Hal ini sangat penting terutama saat ini masyarakat berada pada suatu masa dimana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan.

Program Studi Ilmu Komunikasi STPM D “APMD” memiliki visi “Menjadi Pusat Pengembangan Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2022”. Pencapaian visi tersebut selalu diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi seluruh sivitas akademika. Penerbitan buku ini menjadi salah satu agenda pencapaian visi dan misi Program Studi Ilmu Komunikasi dengan berupaya membedah konsep komunikasi pemberdayaan melalui judul “Komunikasi Pemberdayaan di Era di era 4.0”. Terdapat 7 (tujuh) tulisan yang tersaji dalam buku ini:

1. **KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA DIGITAL** (*Fadjarini Sulistyowati*) membahas tentang kemunculan media digital mengakibatkan komunikasi pembangunan pada satu sisi secara teknologis dimudahkan untuk disebarkan kepada masyarakat, tetapi pada sisi lain membutuhkan intensitas tinggi untuk aktif merespon perkembangan pesan yang beredar. Untuk itu perlu adanya regulasi dan meningkatkan komunikasi pemberdayaan pada masyarakat terhadap penyebaran pesan.
2. **MEDIA SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA** (*Habib Muhsin*) menekankan

bahwa media sosial ibarat “pedang bermata dua” satu sisi memberikan dampak yang positif dan sisi lain memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua mempunyai peranan penting dalam memberikan contoh yang positif dan selalu melakukan kontrol terhadap perilaku anak dalam media sosial.

3. **KONTRIBUSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** (*Yuli Setyowati*) berupaya menegaskan kembali tentang makna *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Munculnya konsep CSR dimulai ketika ada kesadaran bahwa sebagian tanggung jawab yang selama ini dibebankan kepada negara dapat dialihkan kepada aktor lain, terutama pihak swasta. Ketika negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memegang kekuasaan, maka tanggung jawab sosial menjadi tanggung jawab semua aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.
4. **MITOS, BUDAYA, DAN PEMBANGUNAN: SEBUAH TINJAUAN PSIKOLOGI KONSERVASI** (*Irsasri & Yohanes Adhi Satiyoko*) membahas tentang kebudayaan, komunitas sastra-budaya diperlukan sebagai sarana memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada upaya pemandirian masyarakat desa dalam mengelola lingkungan alam yang efektif, konstruktif, dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia pada umumnya.
5. **RELAWAN BENCANA: PARTISIPASI, KOMUNIKASI DAN PELEMBAGAAN** (*Ade*

*Chandra, S. Sos., M. Si & R. Ardian Dwi Roy Subekti*) berbicara tentang perubahan paradigma kebencanaan di Indonesia, dari sekedar penanganan ketika terjadi bencana saja menjadi penanggulangan yang lebih preventif atau pencegahan. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sebagai siklus alam yang harus terlibat dalam rangka untuk mempercepat pemulihan dari bencana.

6. **FENOMENA NGLITHIH DALAM MANAJEMEN PERILAKU DAN ALTERNATIF SOLUSI** (*Sugiyanto*) memotret fenomena klithih dan menegaskan bahwa penanganan klithih membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat, aparat pemerintah setempat dan pihak kepolisian dapat beraktivitas pada tindakan preventif atau pencegahan, tindakan mitigasi, dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku.
7. **POSTER HUMOR PADA AKSI GEJAYAN MEMANGGIL, SAAT MILENIAL MELAWAN SAMBIL BERCANDA** (*Tri Agus Susanto*) melihat bahwa media sosial sangat mempengaruhi generasi milenial dalam pemilihan kata dan penggunaan kalimat untuk poster-poster aksi. Kesadaran akan media sosial bahwa sesuatu yang unik akan cepat viral di media sosial tertanam dalam pada generasi milenial.

Terimakasih kami haturkan kepada pimpinan STPMD “APMD” yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkreasi mengembangkan keilmuan di bidang komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”, untuk itu kami menyadari bahwa tulisan-tulisan dalam buku ini belum

sempurna. Oleh karenanya segala komentar, kritik, ataupun saran mengenai buku ini akan diterima dengan senang hati. Harapan kami buku ini dapat ikut mewarnai diskusi kita semua tentang komunikasi dan pemberdayaan masyarakat di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks.

Yogyakarta, September 2020  
Editor

Yuli Setyowati

# DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	xii
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI ERA DIGITAL	1
Fadjarini Sulistyowati.....	1
MEDIA SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.....	21
Habib Muhsin.....	21
KONTRIBUSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....	50
Yuli Setyowati.....	50
MITOS, BUDAYA, DAN PEMBANGUNAN: SEBUAH TINJAUAN PSIKOLOGI KONSERVASI .....	90
Irsasri dan Yohanes Adhi Satiyoko .....	90
RELAWAN BENCANA; PARTISIPASI, KOMUNIKASI DAN PELEMBAGAAN.....	122
Ade Chandra dan R. Ardian Dwi Roy Subekti .....	122
FENOMENA <i>NGLITHIH</i> DALAM MANAJEMEN PERILAKU DAN ALTERNATIF SOLUSI.....	149
Sugiyanto.....	149

POSTER HUMOR PADA AKSI GEJAYAN MEMANGGIL SAAT MILENIAL MELAWAN SAMBIL BERCANDA.....	188
Tri Agus Susanto .....	188
BIOGRAFI PENULIS .....	213



# KONTRIBUSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Yuli Setyowati

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi pembahasan yang sangat populer, baik di kalangan akademisi, pemerintah, maupun pihak swasta. Tidak sebatas menjadi pembahasan, pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian penting yang termuat dalam banyak kebijakan pemerintah maupun swasta yang selanjutnya diimplementasikan di masyarakat. Upaya ini merupakan proses yang tidak mudah, sebab merupakan proses yang berkelanjutan. Upaya memberdayakan masyarakat merupakan hal yang lebih sulit dibandingkan dengan memberikan bantuan yang bersifat *charity*. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hasilnya tidak langsung dapat dilihat atau dirasakan, sebab pemberdayaan masyarakat adalah proses pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia (Anwas, 2104).

*Corporate Social Responsibility (CSR)* dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Konsep CSR mulai gencar dibicarakan sejak tahun 1970-

an akibat dari perubahan-perubahan yang bersifat global. Munculnya konsep CSR dimulai ketika ada kesadaran bahwa sebagian tanggung jawab yang selama ini dibebankan kepada negara dapat dialihkan kepada aktor lain, terutama pihak swasta. Ketika negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memegang kekuasaan, maka tanggung jawab sosial menjadi tanggung jawab semua aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) telah dikemukakan oleh Howard R. Bowen (Kartini, 2013) dalam karyanya *Social Responsibilities of The Businessman*. Oleh karena karyanya ini, Bowen disebut sebagai "*The Father's of Corporate Social Responsibility*" yang merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai "*The obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society*".

Melalui program CSR, perusahaan dapat memberikan pelayanan, bantuan bahkan pemberdayaan kepada masyarakat melalui tanggung jawab sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, sehingga pada pelaksanaannya program CSR diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan kemandirian pada masyarakat melalui program-program CSR yang diusung oleh perusahaan. Menurut Ambadar (2008), salah satu yang menonjol dari praktik CSR di Indonesia adalah penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat (*community development*). Meskipun CSR bukan semata-mata merupakan *community development*,



namun hal ini memang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kita, yang masih bergelut dengan kemiskinan serta pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi penyebab utama sulitnya memutus rantai kemiskinan. Maka CSR sebagai sebuah konsep yang berubah dan tumbuh sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat bisa menjadi salah satu jawaban.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang panjang dan sangat tergantung dari tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Salah satu kajian yaitu kasus perubahan masyarakat “kampung preman” Badran Yogyakarta melalui proses pemberdayaan masyarakat yang berlangsung kurang lebih hampir 20 tahun. Kampung ini memiliki keunikan karakteristik, selain lama hidup dalam stigma sebagai “kampung preman”, tetapi masyarakatnya justru memiliki kesadaran tentang pentingnya perubahan. Perubahan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kepemimpinan partisipatif, inisiasi lokal, keberfungsian kelompok-kelompok sosial, dan dukungan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*). Proses tersebut dimulai saat kampung ini menjadi wilayah yang terbuka sehingga semakin banyak pendatang masuk dan bertempat tinggal menetap di Kampung Badran. Hadirnya program CSR PT Sarihusada menjadi akselerator bagi proses perubahan masyarakat “kampung preman”.

Proses pemberdayaan masyarakat di Kampung

Badran merupakan kolaborasi dari upaya pemberdayaan masyarakat atas inisiatif dari para tokoh masyarakat dengan diakselerasi oleh hadirnya program CSR PT. Sarihusada. Pemberdayaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, mulai dari membangun diskusi-diskusi tentang masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat kampung Badran (*common felt need*). Dalam konteks ini, forum-forum masyarakat menjadi ajang dimana warga memiliki akses untuk saling bertukar informasi, termasuk cara mereka “membangun budaya malu” terhadap perilaku anggota masyarakat yang “memalukan”.

Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat Kampung Badran dapat dilihat sebagai proses yang holistik sebagai proses yang dinamis yang didahului adanya upaya pemberdayaan masyarakat oleh para tokoh masyarakat dan tidak dapat dilihat secara parsial sebagai hasil dari implementasi program CSR PT. Sarihusada saja. Proses internal dan eksterna inilah yang semakin membawa pada kemandirian masyarakat. Kemandirian ini muncul dari proses adanya tindakan komunikatif masyarakat yang menghasilkan kesepakatan dan kebersamaan untuk memperbaiki mutu hidup agar dapat keluar dari stigma sebagai “kampung preman”. Hal ini membutuhkan keberlanjutan agar kehidupan generasi yang akan datang dapat menjadi lebih baik.

Dalam proses pemberdayaan ini masyarakatlah yang menjadi aktor utama penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik

pijak bagi program nasional. Masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri (Mardikanto, 2013).

## **CSR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

CSR tidak bisa dilepaskan dari praktik pemberdayaan masyarakat atau sering disebut dengan istilah *community development*. Dalam praktiknya, CSR sering dianggap sebagai *corporate giving*, *corporate philanthropy*, dan *corporate community relations*. Tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya merupakan tanggung jawab moral yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para stakeholder yang ada dalam perusahaan, komunitas atau masyarakat serta ekologi/lingkungan. Dengan demikian adanya sebuah perusahaan harus dapat memberikan dampak dan tanggung jawab sosial bagi stakeholder, masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Konsep CSR mulai gencar dibicarakan sejak tahun 1970-an akibat dari perubahan-perubahan yang bersifat global. Munculnya konsep CSR dimulai ketika ada kesadaran bahwa sebagian tanggung jawab yang selama ini dibebankan kepada negara dapat dialihkan kepada aktor lain, terutama pihak swasta. Ketika negara tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memegang kekuasaan, maka tanggung jawab sosial menjadi tanggung jawab semua

aktor, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) telah dikemukakan oleh Howard R. Bowen (Kartini, 2013) dalam karyanya *Social Responsibilities of The Businessman*. Oleh karena karyanya ini, Bowen disebut sebagai "*The Father's of Corporate Social Responsibility*" yang merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai "*The obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society*".

Konsep CSR juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan yang berlaku, yang dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat (Fajar, 2013).

CSR didasarkan pada filosofi yang berkaitan dengan gagasan tentang pentingnya menggabungkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran John Elkington (1997) tentang rumusan *triple bottom lines* yaitu *people, planet, profit*) pada akhir tahun 1990-an yang kemudian disepakati oleh banyak pihak sebagai landasan pengelolaan korporasi yang berkelanjutan (*corporate sustainability*). Melalui konsep tersebut, perusahaan tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan (*profit*), tetapi perusahaan juga harus terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan

masyarakat (*people*), dan harus berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Rumusan *triple bottom lines* kemudian dipakai untuk menjelaskan tiga argumen pengembangan CSR (Mardikanto, 2013), yaitu:

1. Argumen moral, Charles Handy mengartikan bahwa bisnis memiliki kewajiban moral untuk bergerak di luar tujuan memaksimalkan keuntungan dan memuaskan pemegang saham di atas semua stakeholder lainnya.
2. Argumen rasional, Davis dan Blomstrom menyatakan bahwa melalui CSR perusahaan dapat menghindari (minimal menunda) hukuman yang diberikan oleh masyarakat atas pelanggaran peraturan, eksploitasi sumberdaya, dan praktik bisnis yang tidak etis dan dapat dinilai merugikan masyarakat setempat.
3. Argumen ekonomi, oleh Margolis dikatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, perusahaan yang memasukkan CSR ke dalam operasi perusahaan akan menawarkan titik potensi diferensiasi dan keunggulan pasar yang kompetitif yang dapat dibangun demi kesuksesan masa depan.

Sementara itu menurut Suharto (2010), CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Pengertian ini dapat dipahami dengan konsep 4P yang diambil dari konsep John Elkington

tentang *triple bottom lines* yaitu *profit, planet, people*, dan sebagai tambahannya adalah *procedure*. Dengan demikian CSR adalah: “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional”.

Konsep CSR saat ini mengarah kepada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat, atau lebih dikenal dengan istilah *community development (CD)* dan *community empowerment (CE)*. Atau dapat dikatakan bahwa CD merupakan implikasi dari program CSR (Rahman, 2009). *Community development* secara eksplisit dalam CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas atau mutu hidup dari masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. *Community development* dilaksanakan oleh perusahaan dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik dan kebersamaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan karena adanya keyakinan bahwa sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan. Kondisi ketidakberdayaan ini disebabkan oleh proses sejarah perkembangan sosial ekonomi negara-negara yang sedang berkembang akibat periode kolonial, serta disebabkan oleh penggunaan pendekatan pembangunan masyarakat yang diterapkan sebelumnya justru membuat masyarakat di tingkat komunitas lokal menjadi marjinal (Soetomo, 2011).

Robbins, Chatterjee & Canda (dalam Mardikanto,

2010), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah: *"process by which individuals and groups gain power, acces to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals"*. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana individu-individu dan kelompok-kelompok memiliki kekuatan, kesempatan mengakses sumber daya yang ada dan mengontrol kehidupan mereka sendiri. Melalui pemberdayaan masyarakat di Kampung Badran, masyarakat mempunyai kemampuan untuk mencapai aspirasi dan tujuan-tujuan yang lebih tinggi, baik personal maupun kelompok. Terbukti dengan adanya responsivitas masyarakat yang tinggi terhadap perubahan. Sikap responsif tersebut sangat didukung oleh adanya kesukaan belajar yang tinggi. Setiap informasi baru selalu dapat ditransfer secara efektif mulai dari pemangku wilayah kepada kelompok-kelompok kegiatan dan diteruskan sampai ke setiap keluarga.

Pemberdayaan masyarakat dapat menjadikan masyarakat sekitar perusahaan dapat mengaktualisasikan dirinya dan memahami keberadaannya sebagai elemen penting dari perusahaan. Interaksi masyarakat dengan perusahaan akan harmonis, apabila perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan dan sebaliknya, sehingga tercipta modal sosial (*social capital*) di lingkungan perusahaan. Inilah yang menjadi prasyarat *long life corporate* yang seyogyanya menjadi dambaan setiap perusahaan. Kepedulian perusahaan dalam menyisihkan dananya

untuk CSR bukan sesuatu yang dipaksakan melainkan justru menjadi kebutuhan bagi perusahaan. Proses pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya lainnya yang diyakini bisa lebih efektif mewujudkan masyarakat yang berdaya.

## **KONTRIBUSI CSR UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Proses pemberdayaan masyarakat di Kampung Badran dapat dilihat dari tiga hal berikut:

### **1. Lingkup Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat Kampung Badran mencakup pengembangan masyarakat yang dapat dilihat dari empat hal, yaitu pengembangan kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, pengembangan kapasitas lingkungan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Keempat lingkup pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari hasil kolaborasi proses pemberdayaan atas inisiasi para tokoh masyarakat dengan program CSR PT. Sarihusada.

Lingkup pemberdayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Pengembangan Kapasitas Manusia**

Proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran memiliki tujuan utama untuk membentuk sebuah masyarakat yang memiliki karakter yang baik dengan kapasitas yang semakin meningkat. Tujuan tersebut diawali dari sebuah keprihatinan dan kemudian menumbuhkan semangat untuk keluar dari stigma sebagai



“kampung preman”. Seperti dalam Ife (2008) yang mendefinisikan pemberdayaan dari makna pembangunan, bahwa pembangunan pada dasarnya adalah membangkitkan sumber daya manusia, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan.

Masa depan Kampung Badran terletak pada diri masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberdayaan masyarakatnya dimulai dari “membangun budaya malu”. Itu artinya bahwa proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran merupakan upaya yang berpusat pada manusianya. Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*), diungkapkan oleh Korten (1984) menyatakan bahwa pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan pada pertumbuhan ekonomi melalui pasar, maupun untuk memperkuat negara.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung Badran dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah terjadi selama kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir. Dalam hasil penelitian ini dinyatakan bahwa informan meyakini kampungnya sudah berubah 180% dari kondisi dahulu dengan stigma sebagai “kampung preman”. Proses menuju perubahan itu sejalan dengan ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada manusia menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1999) yang meliputi: *pertama*, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. *Kedua*, fokus

utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Ketiga*, mentoleransi variasi lokal sehingga sifatnya fleksibel (menyesuaikan dengan kondisi lokal). *Keempat*, menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar. *Kelima*, proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Pengembangan kapasitas manusia juga menjadi titik tolak program CSR PT. Sarihusada “Rumah Srikandi” yang pelaksanaannya mencakup tiga pilar, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program tersebut memiliki sasaran utama adalah perempuan. Bertambahnya jumlah kader tidak hanya mengandung makna sebagai peningkatan kuantitas saja, melainkan juga peningkatan kualitas manusia melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang diberikan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan bagi para kader. Adanya peningkatan kapasitas kader, terjadi *transfer knowledge* (transfer pengetahuan) dari para kader kepada masyarakat melalui keluarga-keluarga.

## **b. Pengembangan Kapasitas Usaha**

Pengembangan kapasitas usaha dalam proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran dapat dilihat dari dampak yang timbul selama proses tersebut

berlangsung. Dengan adanya upaya melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir melalui aktivitas arisan dan simpan pinjam pada beberapa kelompok kegiatan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi keluarga. Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensinya masing-masing.

Di Kampung Badran telah tumbuh usaha-usaha ekonomi keluarga berupa warung-warung angkringan, warung-warung kelontong, warung pulsa, usaha batu akik, dan usaha-usaha kuliner. Hal ini dapat terjadi karena proses pemberdayaan semestinya mengandung tiga aspek (Anthony Bebbington dalam Mardikanto, 2013), yaitu *enabling* (memungkinkan potensi masyarakat berkembang), *empowering* (memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat), dan *opportunities* (membuka akses dan peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya).

Proses *enabling* dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Badran dapat dilihat dari partisipasi aktif warga masyarakatnya dalam berbagai kelompok kegiatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, ada kelompok menjahit, membuat juputan dan membatik yang diikuti oleh warga yang memiliki ketertarikan untuk belajar dan juga memiliki potensi dalam hal menjahit, juputan, dan membatik. Hasilnya dapat dijual sehingga mampu membantu menopang ekonomi keluarga.

Proses *empowering* lebih pada proses penguatan atas potensi yang telah dimiliki. Potensi yang dimiliki

oleh masyarakat Kampung Badran utamanya adalah potensi sungai. Potensi tersebut pada awalnya telah menghasilkan usaha pembuatan dan penyewaan kolam renang, kolam lele, dan pamswakarsa. Namun agak disayangkan bahwa usaha kolam renang dan kolam lele saat ini tidak berjalan, disebabkan oleh ego kewilayahan RT. Sehingga usaha yang sampai sekarang masih berjalan adalah usaha panswakarsa yang diberi nama Banyu Bening Winongo (B2W). Usaha ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat karena telah mampu membangun jaringan distribusi air bersih ke dua RT yang terdekat dengan sungai Winongo, yaitu RT 48 dan 49 dengan sistem membayar murah.

Dengan proses pemberdayaan yang berlangsung juga telah mampu membuka akses dan peluang (*opportunities*) untuk masyarakat lebih berdaya. Para tokoh masyarakat Kampung Badran memiliki kemampuan berjejaring yang bagus. Sosok Ibu Endang Rohjiani, Bapak Joko Sularno, Ibu Siti Rojanah, dan Ibu Partini adalah tipe-tipe orang yang mampu memanfaatkan akses dan peluang dari luar untuk dibawa masuk ke Kampung Badran sehingga membawa dampak pada keberdayaan masyarakat.

### **c. Pengembangan Kapasitas Lingkungan**

Pengembangan kapasitas lingkungan meliputi lingkungan fisik dan sosial. Pengembangan kapasitas lingkungan fisik dimulai dengan mendirikan bank sampah “Lintas Winongo”. Upaya ini berawal dari keinginan beberapa tokoh masyarakat untuk menciptakan kampung

yang bersih, sebab dulu kondisi Kampung Badran itu termasuk kumuh. Sekarang perkembangan bank sampah “Lintas Winongo” menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kampung Badran. Selain karena kampungnya menjadi bersih, kebanggaan tersebut berasal dari diperolehnya penghargaan *Green and Clean Award* empat tahun berturut-turut mulai tahun 2013 hingga 2016, bahkan sejak tahun 2016 posisi Bank Sampah Kampung Badran semakin meningkat dengan diraihnya penghargaan sebagai Bank Sampah Tingkat Pembina se-Provinsi DIY.

Sejalan dengan pengembangan kapasitas lingkungan fisik tersebut, secara otomatis juga terjadi pengembangan kapasitas lingkungan sosial. Perilaku-perilaku menyimpang masyarakat yang dulu menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kampung Badran sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Sebagai contoh, perilaku konsumsi miras pasti berhubungan dengan rokok dan lainnya yang dapat menimbulkan lingkungan sosial yang tidak sehat. Proses penyadaran dilakukan secara gencar oleh para kader dan pemangku wilayah melalui forum-forum dalam kelompok-kelompok kegiatan. Pintu masuknya mayoritas adalah kaum perempuan. Hal ini sangat efektif, dibuktikan dengan terjadinya perubahan yang dimulai dari keluarga.

Dalam konteks CSR, yang termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan atau areal kerja, maupun wilayah yang mengalami dampak negatif akibat dari kegiatan

perusahaan. Program CSR PT. Sarihusada memiliki keunikan sebab tidak mengambil lokasi sekitar pabrik. Kampung Badran terletak jauh dari tempat beroperasinya PT. Sarihusada, namun dipilih menjadi tempat implementasi program CSR. Hal ini dilandasi oleh keinginan PT. Sarihusada untuk terlibat aktif dalam upaya perbikan kesejahteraan sosial masyarakat Kampung Badran.

#### **d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan**

Dalam proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran juga terjadi pengembangan kapasitas kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kelompok kegiatan yang perkembangannya sangat bagus, yaitu Koperasi Amal Srikandi, Koperasi Panca Arta, dan Bank Sampah "Lintas Winongo". Mardikanto (2013) menyatakan bahwa suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu: (a) komponen person, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas; (b) komponen kepentingan, yaitu sesuatu yang mengikat interaksi orang-orang dalam organisasi; (c) komponen aturan, yaitu seperangkat kesepakatan yang dipegang bersama, sehingga seseorang dapat menduga perilaku orang lain dalam lembaga tersebut; dan (d) komponen struktur, yaitu posisi dan peran yang harus dijalankan dalam organisasi. Kelembagaan kelompok-kelompok kegiatan di Kampung Badran mayoritas telah memenuhi keempat komponen tersebut. Hal ini tercermin dalam berlangsungnya

kegiatan secara teratur pada tiap bulan, memiliki kepengurusan dan aturan yang jelas, dan mengikat interaksi para anggotanya.

Seperti dikatakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat yang perlu ditekankan tidak hanya penguatan individu, tetapi juga kelompok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Harry Hikmat (dalam Alfitri, 2011) bahwa pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual (*individual self-empowerment*), tetapi juga secara kolektif (*collective self-development*). Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri (*self actualization*) dan eksistensi manusia dan kemanusiaan. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di Kampung Badran merupakan gambaran bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan bukan hanya mengarah pada pemberdayaan individual saja tetapi juga pemberdayaan kelompok. Hal tersebut merupakan bagian dari aktualisasi diri Kampung Badran yang dapat dilihat perubahannya oleh masyarakat luar.

## **2. PENERIMA MANFAAT**

Dampak dari upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang diterima oleh para penerima manfaat. Istilah penerima manfaat (*beneficiaries*) mengandung makna: (1) memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan,

fasilitator dan pemangku kepentingan yang lain, (2) perlu difasilitasi sebagai rekan sekerja dalam menyukseskan pembangunan, (3) memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan oleh fasilitator, (4) proses belajar yang berlangsung merupakan proses belajar bersama yang bersifat partisipatif.

Proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran menimbulkan manfaat, baik langsung (*direct beneficiaries*) maupun manfaat tidak langsung (*indirect beneficiaries*). Penerima manfaat langsung dari program CSR PT. Sarihusada yang utama adalah para kader, yang terdiri dari para ibu-ibu. Kaum perempuan sering menjadi ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti dalam Anwas (2014) dinyatakan bahwa pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Dari pengetahuan yang dimiliki oleh para kader, seharusnya yang pertama mendapat manfaat adalah anggota keluarganya. Namun demikian, hal tersebut belum optimal tercapai. Selanjutnya para kader melakukan transfer pengetahuannya kepada masyarakat melalui forum-forum kelompok kegiatan yang meliputi kelompok kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jadi warga masyarakat yang tidak termasuk kader dapat digolongkan sebagai penerima manfaat tidak langsung.

Selain itu, penerima manfaat melalui upaya pemberdayaan masyarakat di luar program CSR PT.



Sarihusada meliputi seluruh lapisan masyarakat, yaitu anak-anak, pemuda, dan orang tua. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran ini merupakan proses pemberdayaan keluarga. Anwas (2014) menegaskan bahwa salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat adalah bahwa pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi harus holistik mencakup semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Pihak pemerintah dikatakan sebagai penerima manfaat penentu kebijakan, sedangkan perusahaan, LSM pendamping, institusi mitra, dan perguruan tinggi juga termasuk dalam kelompok penerima manfaat pendukung yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat sesuai kepentingannya masing-masing.

Menurut Mardikanto (2013) implementasi CSR tidak hanya memberikan manfaat bagi warga masyarakat yang diberdayakannya, tetapi mampu memberikan manfaat juga kepada pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR.

Jika dilihat dari karakteristik penerima manfaat pemberdayaan masyarakat Kampung Badran, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki karakteristik yang beragam. Dilihat dari karakteristik pribadi, penerima

manfaat meliputi semua jenis kelamin, semua etnis yang tinggal di Kampung Badran, semua masyarakat dari berbagai agama, serta semua masyarakat yang memiliki jenis pekerjaan yang beragam pula. Demikian pula jika dilihat dari status sosial ekonomi dan karakteristik psikologis, penerima manfaatnya juga heterogen. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menyatakan bahwa pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat (Anwas, 2014). Manfaat yang diterima oleh masyarakat dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat sasaran, Seperti yang dinyatakan oleh Karsidi (2001), bahwa tercapainya tujuan pemberdayaan dapat dilihat dari keefektifan atau keberhasilan suatu kegiatan yang diukur dari seberapa jauh terjadi perubahan perilaku sasaran, yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.

### **3. KINERJA PEMBERDAYAAN**

#### **a. Kebijakan**

Program CSR PT. Sarihusada pada dasarnya telah dimulai sejak perusahaan berdiri tahun 1954 dalam mengemban misi sosial didukung oleh adanya kebijakan pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal pemenuhan gizi anak. Dalam konteks penelitian ini, proses pemberdayaan masyarakat Kampung Badran melalui program CSR PT. Sarihusada mendapat penguatan dengan adanya kebijakan pemerintah yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut, PT. Sarihusada menetapkan kebijakan perusahaan tentang CSR di beberapa lokasi, diantaranya di Kampung Badran. Dalam implementasinya, pihak perusahaan bermitra dengan beberapa *stakeholders*, yakni pihak pemerintah, tokoh masyarakat, LSM pendamping, serta kelompok-kelompok masyarakat. Keefektifan program tersebut diperkuat oleh adanya pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh para tokoh masyarakat dan telah disesuaikan dengan program dari pemerintah untuk wilayah RT, RW dan kelurahan.

#### **b. Kelembagaan**

Organisasi pelaksana pemberdayaan masyarakat melalui program CSR di tingkat perusahaan PT. Sarihusada pada periode tahun 2009-2104 dilaksanakan oleh Divisi *Public Relations*, sementara itu pendampingannya diserahkan kepada PKPU Human Initiative. Sistem pelaporannya dimulai dari tim pendamping membuat laporan ke *Public Relations Manager*, kemudian diteruskan kepada Top Manajemen PT. Sarihusada dan Danone sebagai pemilik saham. Di tingkat masyarakat, kelembagaan pemberdayaan masyarakat berada di bawah pengelolaan pemangku wilayah RW. Dalam hal ini Ketua RW membawahi seluruh RT dan kelompok-kelompok sosial yang kepengurusannya setingkat RW. Secara periodik bulanan ketua RW melakukan koordinasi dengan para pengurus kelompok-kelompok sosial guna mendapatkan informasi tentang kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh

masing-masing kelompok sosial.

### **c. Ketenagaan**

PT. Sarihusada mendelegasikan pelaksanaan CSR kepada lembaga pendamping, dalam hal ini adalah PKPU Human Initiative, selanjutnya lembaga pendamping membentuk tim pelaksana yang terdiri dari 7 orang. Tim pendamping secara rutin berkoordinasi dengan para kader kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Diantara para kader tersebut, dipilih beberapa orang sebagai koordinator untuk masing-masing pilar guna mempermudah koordinasi dan komunikasi antara tim pendamping dengan keseluruhan kader. Dalam implementasinya, para kader inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kampung Badran dengan cara secara terus-menerus memotivasi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Kelebihan dalam hal ketenagaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Badran adalah adanya partisipasi aktif para kader dalam berbagai kegiatan di kampung, baik kegiatan yang diadakan melalui program CSR maupun kegiatan di luar program CSR. Hal ini menjadi pola sinergi yang baik dalam proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada *stakeholders* terkait.

### **d. Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan program CSR PT. Sarihusada dilakukan berdasarkan program yang diajukan oleh pihak PR PT. Sarihusada dan proposal yang diajukan oleh masyarakat, selanjutnya proposal tersebut diteruskan ke pihak Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota

Yogyakarta mengajukan beberapa alternatif wilayah yang dapat dipilih sebagai penerima manfaat Program CSR PT. Sarihusada berdasarkan beberapa kriteria. Dalam implementasinya, penyelenggaraan program CSR didasarkan pada aktivitas kelompok-kelompok sosial yang telah berjalan di masyarakat kemudian disesuaikan dengan pilar-pilar pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi program CSR PT. Sarihusada.

#### **e. Pembiayaan**

Pembiayaan program CSR PT. Sarihusada di Kampung Badran sepenuhnya berasal dari anggaran PT. Sarihusada. Total pembiayaan program CSR di Kampung Badran dipergunakan untuk mengimplementasikan tiga pilar pemberdayaan masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penggunaan biaya tersebut dikelola oleh tim pendamping, diperuntukkan bagi pembiayaan pelatihan-pelatihan kader, bantuan penambahan sarana belajar PAUD, dan bantuan penambahan gizi bagi peserta pondok gizi. Keberlanjutan pembiayaan di tingkat masyarakat dilakukan dengan menempuh upaya iuran dana kegiatan warga sebesar Rp. 500/kepala keluarga/bulan serta dana sosial kematian sebesar Rp. 500/jiwa/bulan. Iuran warga ini dikumpulkan melalui bendahara masing-masing RT, selanjutnya disetorkan kepada bendahara RW.

#### **f. Sarana-prasarana**

Sarana dan prasarana implementasi CSR PT. Sarihusada disesuaikan dengan program-program yang sudah disepakati bersama masyarakat. Penambahan sarana dilakukan untuk kegiatan PAUD berupa APE (Alat

Peraga Edukasi) dan posyandu serta pondok gizi. Sedangkan prasarana lebih banyak menggunakan tempat yang sudah ada di Kampung Badran, kecuali jika dilakukan pelatihan-pelatihan biasanya dilakukan dengan menyewa tempat di luar Kampung Badran.

#### **g. Pengendalian**

Pengendalian dan pengawasan program CSR PT. Sarihusada dilakukan oleh PT. Sarihusada diteruskan kepada jajaran Direksi dan pihak Danone. Proses pengendalian dan pengawasan dilakukan secara periodik yaitu tiap triwulan, semester dan tahunan, baik berupa laporan tertulis maupun kunjungan lapang oleh pihak direksi dan Danone. Kunjungan lapang oleh pihak perusahaan dilakukan secara periodik hingga saat ini, walaupun program CSR telah berakhir. Hal ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan program dan penajagan kemajuan-kemajuan masyarakat yang dapat menjadi bahan kerjasama selanjutnya. Keselarasan antara upaya pengendalian yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan masyarakat ditempuh melalui cara monitoring dan evaluasi secara periodik bulanan oleh Ketua RW kepada para pengurus kelompok-kelompok sosial. Di samping itu, sebagai bukti hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, diadakan gelar potensi masyarakat tiap kali kunjungan pihak PT. Sarihusada dan Danone serta kepesertaan aktif kelompok-kelompok sosial pada pameran-pameran potensi daerah yang diadakan di tingkat kota maupun provinsi. Namun demikian, pihak pemerintah, dalam hal ini adalah kelurahan dan kecamatan masih merasa kesulitan dalam dalam

melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi program CSR tersebut, dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara perusahaan maupun tim pendamping dengan pihak pemerintah setempat.

Komunikasi yang dilakukan dapat menjadi sarana membangun relasi antarindividu dan kelompok. Dalam relasi tersebut lambat laun terbangun pemahaman tentang dunia mereka selama ini dan sekaligus membukakan wawasan tentang dunia yang lebih baik kondisinya. Ruben dan Stewart (2013) menyatakan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi individu, relasi, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Komunikasi merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk mengekspresikan diri dan memengaruhi orang lain, serta membuat kesan tentang dan kepada dunia. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Jadi komunikasi memungkinkan manusia mengkoordinasikan semua kebutuhannya dengan dan bersama orang lain.

Dalam upaya menjelaskan konseptualisasi komunikasi dalam perspektif konfergensi, Miller (2002) mengemukakan bahwa komunikasi dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu: (1) *communication is a process*, (2) *communication is transactional*, dan (3) *communication is symbolic*.

*Communication is a process* memaknai komunikasi sebagai suatu proses dimana setiap peristiwa dan relasi-relasi yang terjadi bersifat dinamis, *on-going*, selalu berubah dan berkesinambungan. Proses perubahan masyarakat Kampung Badran memperlihatkan bahwa dinamika masyarakat menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Di dalamnya terjadi relasi-relasi antarindividu yang sangat dinamis. Relasi-relasi yang tercipta mampu menggerakkan masyarakat ke dalam suatu motivasi perubahan. Hingga saat ini proses tersebut masih terpelihara dengan baik.

*Communication is transactional* melihat bahwa komunikasi merupakan proses interaksi dimana antarpartisipan komunikasi berpartisipasi secara aktif, saling memberi umpan balik, berbicara, merespon, melakukan aksi dan reaksi serta saling mempengaruhi. Berdasarkan hasil penelitian, proses komunikasi yang terjadi, baik formal maupun informal dapat memberikan ruang yang sangat luas untuk para partisipan berpartisipasi secara aktif, saling memberikan umpan balik dengan argumentasi yang baik. Dalam proses komunikasi tersebut, para partisipan saling memengaruhi satu sama lain melalui pembicaraan yang dilakukan. Cara merespon pembicaraan orang lain pun memperlihatkan cara yang santun, walaupun sering berisi kritikan, namun hal tersebut selalu bersifat konstruktif. Hal ini dapat terjadi, tidak lepas dari peran pemimpin. Dengan kondisi tersebut, masyarakat menjadi terbiasa menyampaikan aksi dan reaksi secara positif.

*Communication is symbolic* dapat dimaknai bahwa



proses komunikasi melibatkan simbol-simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam perspektif kognitif, Colin Cherry (Bungin, 2006) menyatakan bahwa komunikasi merupakan penggunaan lambang-lambang (simbol-simbol) untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang suatu objek atau kejadian. Makna yang terkandung dalam simbol-simbol verbal terutama terlihat dari penggunaan bahasa sehari-hari. Perubahan pola pikir dan perilaku tercermin dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Perilaku nonverbal yang tercermin dari bahasa tubuh, intonasi suara, mimik muka secara otomatis mengalami perubahan seiring dengan dinamika perubahan karakter masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Barbara Ballis Lal (Littlejohn & Foss, 2008) dalam konsep interaksionisme simbolik bahwa: (a) manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka; (b) kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi, sehingga terus berubah; (c) manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial; (d) dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial; (e) tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, dimana objek dan tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan diartikan, dan (f) diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan

layaknya semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain.

Terbentuknya kelompok-kelompok sosial di Kampung Badran merupakan ruang publik yang dapat dijadikan sebagai ruang komunikasi antarwarga, walaupun hingga saat ini masih banyak ruang komunikasi yang memerlukan optimalisasi sehingga dapat berfungsi lebih baik. Kelompok-kelompok sosial di Kampung Badran dalam istilah Habermas merupakan ruang publik bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala ide atau gagasan mereka. Melalui komunikasi di ruang publik tersebut, masyarakat mengalami proses belajar sebagai bagian dari proses sosial antaranggota masyarakat. Proses belajar ini mengkondisikan individu-individu untuk saling bekerja sama, sehingga membentuk tindakan kolektif. Seperti dikatakan oleh Soetomo (2012) bahwa dalam proses relasi sosial terjadi tindakan bersama, bukan tindakan individual. Tindakan bersama mengandung unsur kolektivitas, sehingga membutuhkan energi yang mampu menggerakkan kerja sama. Tindakan bersama ini dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan dan kepentingan bersama yang difasilitasi oleh institusi sosial dan berorientasi pada aturan yang disepakati bersama. Hasil dari tindakan bersama tersebut adalah adanya perkembangan dan peningkatan kemampuan institusi sosial, pengetahuan lokal, dan mekanisme pencapaian tujuan. Kesemuanya berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan.

Pada konteks masyarakat Kampung Badran,

keberadaan kelompok-kelompok sosial sangat efektif untuk media pemberdayaan masyarakat. Dalam kelompok-kelompok sosial tersebut terjadi komunikasi yang lebih dialogis diantara anggotanya. Dengan adanya komunikasi dialogis, antaranggota kelompok memiliki kesempatan untuk saling mengapresiasi, saling memahami keberadaan orang lain, serta menumbuhkan kesadaran kolektif. Di samping itu, kesenjangan sosial antar masyarakat semakin lama semakin berkurang dengan terbentuknya solidaritas sosial kelompok yang terbentuk dari adanya kesadaran kolektif. Friedmann (dalam Nasdian, 2014) menyebut kelompok sosial sebagai wadah paling efektif untuk pemberdayaan di tingkat komunitas yang memungkinkan individu untuk mengorganisir diri dalam kelompok tersebut (*collective self-empowerment*). Dalam kelompok inilah akan terjadi suatu *dialogical encounter* (pertemuan dialogis) yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Dalam hal ini anggota kelompok saling menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Perilaku setiap individu dalam kelompok bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bentuk tindakan yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Perilaku warga masyarakat Kampung Badran dulu dan sekarang merupakan bentuk perilaku hasil dari proses belajar dalam sistem sosialnya. Seperti dikatakan oleh Talcott Parsons (Ritzer, 2003) dalam Teori Aksi yang merupakan bagian dari teori Konstruksi Sosial bahwa tiap individu dapat dikaitkan dengan sistem sosialnya melalui status dan

perannya, dimana tiap individu dalam sistem sosialnya memiliki status dan berperan sesuai dengan aturan atau norma dalam sistem sosial tersebut. Perubahan-perubahan perilaku yang dialami oleh masyarakat Kampung Badran membawa pada perubahan status, baik sosial maupun ekonomi, dan perannya di masyarakat.

Pengaruh komunikasi dalam kelompok-kelompok sosial di Kampung Badran terhadap perubahan-perubahan perilaku masyarakatnya cukup besar. Dari hasil wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa respon masyarakat untuk terlibat dalam kelompok-kelompok sosial tersebut sangat tinggi. Satu individu dapat tergabung dalam 4 atau 5 atau lebih kelompok sosial. Mereka sangat menikmati aktivitas kelompok-kelompok yang diikuti. Dengan demikian, interaksi yang terjadi di dalam kelompok sangat mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Peran kader sebagai fasilitator pada tiap kelompok sangat efektif. Mereka tidak bosan-bosan mengkomunikasikan hal-hal positif demi perubahan karakter warga masyarakatnya. Seperti dapat dipahami melalui Teori Aksi, yang menyatakan bahwa kelompok acuan (*reference group*) memiliki peranan yang penting yang digunakan acuan individu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan norma masyarakat. Bahkan kelompok referensi dapat dijadikan acuan bagi individu yang tidak termasuk anggota suatu kelompok sosial untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok tersebut. Perilaku manusia merupakan hasil dari pengalaman serta interaksinya dengan lingkungan sehingga menghasilkan pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku individu

merupakan respon terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya setelah melalui proses berpikir dan dalam bentuk perilaku yang nampak (Soekanto, 1990).

Dalam setiap proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok sosial maupun dalam komunikasi antarindividu sehari-hari, setiap individu dapat menjadi subjek bagi dirinya sendiri. Masing-masing individu bebas untuk menafsirkan setiap pesan atau informasi yang dikomunikasikan dengan individu yang lain. Proses menafsirkan tindakannya sendiri mencerminkan bahwa individu adalah subjek bagi diri dan dunianya. Tiap individu memiliki kemampuan untuk membangun atau mengonstruksi realitas sosialnya. Dalam teori Konstruksi Sosial, Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjelaskan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antarmanusia dan menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, melainkan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengonstruksi dunia sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002).

Konsep konstruksi sosial realitas (*social construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Poloma, 2004). Dari hasil penelitian, fenomena tersebut tertangkap

dengan jelas ketika masyarakat terlibat dalam pertemuan-pertemuan kelompok. Pertemuan-pertemuan yang diadakan menjadi realitas bersama yang sangat dinamis karena masing-masing individu bebas menyampaikan pendapatnya berdasarkan cara pandangnya masing-masing. Warga masyarakat sudah terbiasa memosisikan diri, di saat ada dalam forum formal mereka akan berperilaku dan berpendapat secara formal, sedangkan di saat mereka berada dalam pertemuan yang tidak formal, perilaku dan cara bertutur kata juga menjadi santai tanpa ada sekat yang menghalangi mereka untuk berkomunikasi walaupun status sosial dan ekonomi mereka berbeda. Komunikasi mereka bersifat egaliter. Hal tersebut sepertinya tidak lepas dari latar belakang kehidupan mereka selama ini. Cara berbicara yang *ceplas-ceplos* menjadi ciri khas warga masyarakat Kampung Badran.

Dalam interaksionisme simbolik, menurut Blumer (Poloma, 2004), aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan dari orang lain, tetapi mencoba menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kedirian atau "*self*". Dalam melakukan interaksi, individu satu dan lainnya diantarai oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran, yaitu bahasa. Tindakan penafsiran simbol oleh individu akan memberikan arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Karena itulah, dalam interaksi di masyarakat Kampung Badran, individu yang terlibat merupakan aktor yang sadar dan reflektif karena bertindak sesuai dengan penafsiran, artinya individu bertindak berdasarkan rasio

dan pertimbangan. Konsep ini kemudian disebut oleh Blumer sebagai "*self indication*", yaitu proses komunikasi yang sedang berjalan dalam proses ini individu mengetahui sesuatu, menilai, memberi makna dan memutuskan untuk bertindak. Proses ini juga yang membuat individu mampu mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu.

Upaya pemberdayaan yang telah dilakukan di Kampung Badran merupakan proses yang panjang hingga saat ini, namun demikian perubahan demi perubahan sudah dapat dilihat. Kampung Badran yang dahulu kelihatan mengerikan, sekarang berubah menjadi kampung yang sangat terbuka. Masyarakatnya telah banyak mengalami perubahan karakter, baik dalam hal pola pikir maupun perilaku, terdapat banyak kegiatan masyarakat yang dapat membawa banyak perubahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Kampung Badran sudah sering mendapat kunjungan dari daerah lain untuk tempat studi banding, khususnya mengenai bank sampah.

Dalam proses waktu, perubahan karakter masyarakat Badran yang dulu hidup dengan stigma "kampung preman" mengalami dinamika dalam tindakan komunikasinya. Bentuk komunikasi yang digunakan lebih banyak menggunakan komunikasi interpersonal. Meskipun masyarakat Badran termasuk dalam wilayah perkotaan, namun sifat-sifat tindakan komunikasinya lebih mencerminkan tindak komunikasi yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, solidaritas dan rasa empati.

Bahasa sehari-hari sebagai simbol berkomunikasi saat ini merupakan bahasa yang lebih beretika, artinya bahasa yang tidak mengandung kekerasan dan dapat membangun harmoni kehidupan masyarakat. Seperti pendapat Habermas (Hardiman, 2009) bahwa tindakan komunikatif diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari-hari sebagai medium bagi tindakan tersebut. Dalam hal ini bahasa dalam komunikasi menjadi unsur yang sangat penting untuk menghasilkan tindakan komunikatif tertentu. Tindakan komunikatif ini muncul sebagai hasil interaksi antarsubjek sesuai dengan kesepakatan di antara subjek tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Habermas (Hardiman, 2009), bahwa masyarakat pada hakikatnya komunikatif, dan yang menentukan perubahan sosial bukanlah semata-mata perkembangan kekuatan produksi atau teknologi, melainkan proses belajar dalam dimensi praktis-etis. Teknologi dan faktor objektif lain baru bisa mengubah masyarakat jika masyarakat mengintegrasikannya ke dalam tindakan komunikatif yang memiliki logikanya sendiri-sendiri. Fenomena masyarakat Kampung Badran memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir mereka mengalami proses belajar bersama yang akhirnya mengantarkan pada perubahan demi perubahan. Dalam proses belajar tersebut mereka saling berkomunikasi, menerima dan mengirim pesan atau informasi satu sama lain, kemudian mengintegrasikannya dalam suatu



tindakan komunikatif melalui bahasa sehari-hari yang dipahami bersama.

Tindakan komunikatif dalam pemberdayaan masyarakat yang didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan pada dasarnya mengarah pada terciptanya perbaikan mutu hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Seperti yang dikatakan oleh Mardikanto (2010) bahwa tujuan pemberdayaan lebih pada upaya perbaikan mutu hidup masyarakat yang meliputi beberapa aspek. Perbaikan mutu hidup tersebut dapat dicapai dengan perbaikan-perbaikan yang meliputi: (a) perbaikan pendidikan (*better education*); (b) perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*); (c) perbaikan tindakan (*better action*); (d) perbaikan kelembagaan (*better institution*); (e) perbaikan usaha (*better business*); (f) perbaikan pendapatan (*better income*); (g) perbaikan lingkungan (*better environment*); (h) perbaikan kehidupan (*better living*); dan (i) perbaikan masyarakat (*better community*). Kondisi kehidupan yang lebih baik dengan didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang membaik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan melihat tujuan-tujuan pemberdayaan tersebut, tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah terwujudnya perubahan-perubahan yang semakin baik, mulai dari level individu, keluarga, masyarakat, maupun lingkungannya.

Keefektifan program CSR sangat didukung oleh adanya kondisi masyarakat yang *guyub rukun*. Masyarakat yang *guyub rukun* akan selalu mengedepankan kebersamaan dalam setiap aspek

berkehidupan bersama. Jika terjadi konflik, semangat kebersamaan selalu dapat digunakan untuk mengatasi konflik tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran pihak lain dalam suatu masyarakat yang *guyub rukun* selalu mendapat sambutan dan persepsi yang positif. Persepsi yang positif tersebut sangat mendukung terbangunnya tindakan yang mendukung munculnya partisipasi aktif masyarakat berupa keterlibatan aktif masyarakat dan kesukarelaan dalam bertindak. Dengan adanya partisipasi aktif tersebut, maka pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan suatu perubahan masyarakat sesuai yang diharapkan.

## **PENUTUP**

Pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya harus muncul dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat tentang kehidupannya akan membangkitkan semangat untuk memperbaiki mutu kehidupan menuju pada suatu kondisi masyarakat yang diinginkan melalui proses perubahan pada semua aspek kehidupannya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang berasal dari dalam akan semakin cepat ketika dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat dari luar. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan melalui program CSR. Program CSR mampu menjadi akselerator bagi proses pemberdayaan masyarakat yang telah dimulai sebelumnya, sehingga menjadi lebih holistik.

Masyarakat dapat merasakan proses belajar sosial

melalui pemberdayaan masyarakat, baik dari dalam maupun melalui program CSR. Hal ini ditandai oleh terjadinya perubahan-perubahan pola pikir dan perilaku dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga serta tumbuhnya kemandirian masyarakat. Proses belajar sosial tersebut terlihat dari adanya penyesuaian diri warga masyarakat pada pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat telah membentuk sistem sosial yang baru, termasuk karena adanya bentuk kepedulian perusahaan melalui implementasi program CSR semua kegiatan yang ada pada wilayah dapat terbantu. Dalam hal ini, masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat bermakna. Menurut Bungin (2006), perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial yang baru. Adanya program CSR juga dapat memberikan semangat untuk tetap melanjutkan berbagai kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya secara lebih baik yang ditandai oleh adanya keberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai proses yang mengantarkan masyarakat pada keberlanjutan (*sustainability*). Dalam konteks ini komunikasi memegang peran penting dalam

mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. 2011. *Community Development. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ambadar, J. 2008. *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. Edisi 1. Jakarta:

Penerbit Elex Media Computindo.

Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutic, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Reflektif*. Surabaya: Insan Cendekia.

Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi. Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Elkington, John. 1997. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21<sup>st</sup> Century Business*. Gabriola Islan BC: New Society Publishers.

Fajar, Mukti. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Studi tentang Penerapan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hardiman, F. Budi. 2009. *Menuju Masyarakat*

*Komunikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. *Community Development: Community-Based Alternatives in An Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education.

Littlejohn, Stephen W & Foss, Karen A. 2008. *Theories of Human Communication*. Edisi 9. Belmont USA: Thomson Wadsworth.

Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility. Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Karsidi, Ravik. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *MEDIATOR*, Vol. 116 2 No.1 2001.

Korten, David C and Rudi Klauss. 1984. *People Centered Development. Contributions toward Theory and Planning Framework*. USA: Kumarian Press.

Mardikanto, Totok. 2013. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Acuan Bagi Aparat Birokrasi, Akademisi, Praktisi, dan Peminat/Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat. Surakarta: UNS Press.

Mardikanto, Totok. 2010. *Komunikasi Pembangunan. Acuan bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Miller, Katherine. 2002. *Communication Theories. Perspectives, Processes, and Contexts*. New York: Mc Graw Hill.

Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Poloma, Margareth. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility. Antara teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo

Ritzer, George – Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Dialihbahasakan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ruben, Brent D & Steward, Lea P. 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Edisi Kelima. Terjemahan Ibnu Hamad dari buku *Communication and Human Behavior (Fifth Edition)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat. Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2010. *CSR & Comdev. Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas